

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP KINERJA PENYULUHAN PENCATATAN SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PERILAKU WARGA MASYARAKAT MENGGUNAKAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN GARUT

¹Anry Sutrisno

¹Dosen Program Studi D3 Kebidanan STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut.
Email: nylabags@gmail.com

Change people's behavior in Garut is expected to be able to change for the better in terms of aware of the obligation to pay the levy, it is also determined by the role of a performance extension of the district registry office. As found in this study suggest that policy implementation Implementation of Administration of Population and Civil Registration Service Retribution effect real and positive impact on Performance and Behavior Counseling Civil Registration Citizens using the Civil Registry Service. The implications of the findings in this study are the phenomenon of obstruction of efforts to deliver information program of birth certificates to the public, resulting in low levels of participation and public confidence in the civil registration services. This condition will affect the low orderly population administration in the community.

Keywords: Retribution, Performance Extension, the Civil Registry.

A. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah terdapatnya fenomena masih rendahnya kemampuan Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil yang menyebabkan pelayanan pada masyarakat belum baik sehingga kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Garut belum dilaksanakan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan yang ada di pencatatan sipil, dan kinerja penyuluhan pencatatan sipil lebih baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran (*target population*) adalah Pegawai Pemerintah, yang mengelola akta kelahiran di Kabupaten Garut. Populasi atau satuan analisis dalam penelitian ini adalah 74 pegawai dinas kependudukan dan

pencatatan sipil jumlah seluruh responden adalah 74 orang. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan model analisis jalur (*Path Analysis*)

Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan bahwa Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil, dan memperlihatkan sifat yang positif/berkorelasi antara Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil Secara kualitatif, gambaran hubungan tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak dapat dipisahkan dalam hal memberikan pengaruh terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil. Artinya Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus didukung oleh Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil dalam mencapai Kinerja

Penyuluhan Pencatatan Sipil dan mewujudkan Perilaku Masyarakat dalam Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil, begitupun juga sebaliknya.

Namun demikian ditemukan pula beberapa permasalahan yang dipandang penting, yaitu: 1) Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menjadi landasan Program Kepemilikan Akta Kelahiran belum disosialisasikan secara baik kepada seluruh masyarakat dan standar pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan belum jelas. 2) Retribusi pelayanan Pencatatan Sipil adalah minimnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas dan masih rendahnya tingkat pendidikan diduga kuat sebagai sulitnya mencari orang yang berkualitas dan profesional di bidangnya, hasilnya materi sosialisasi yang akan disampaikan menjadi tidak maksimal. 3) Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil, yaitu terdapat pada peningkatan kinerja pegawai, melakukan pembinaan, sinkronisasi pimpinan dan bawahan, dilakukan dalam rangka mencapai hasil kerja yang lebih baik. 4) Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil mengenai Warga masyarakat yang menyampaikan informasi tentang pelayanan pencatatan sipil dengan menggunakan alat peraga atau poster penyuluhan.

Oleh karena itu disarankan beberapa hal, yaitu: 1) Supaya tujuan kebijakan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, penulis menyarankan hendaknya sosialisasi dan pengawasan yang dilaksanakan harus secara baik dan fungsi kebijakan dilaksanakan secara lebih efektif melalui koordinasi yang di dukung dengan komunikasi yang persuasif maka pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan. 2) Supaya tujuan program kepemilikan akta kelahiran dapat mencapai keberhasilan maka dalam pelaksanaan

sosialisasi Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil harus dengan metoda yang baik serta dilaksanakan oleh para penyuluh yang memiliki kualifikasi pengetahuan yang baik pula. 3) Pelaksanaan Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil dalam melakukan Pelayanan yang baik akan menunjang terhadap mutu pelayanan pencatatan sipil kepada warga masyarakat. 4) Perilaku Warga Masyarakat Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil sangat menunjang terhadap keberhasilan tertib administrasi termasuk dalam program kepemilikan akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum mempunyai akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak, bahkan merupakan hak yang pertama kali dimiliki oleh anak, karena ketika lahir anak seharusnya segera diuruskan aktanya. Terhadap hak anak tersebut, Negara harus memenuhinya dengan mencatatkan kelahirannya. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan kta kelahiran, yakni sebagai berikut :

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya
2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.
3. merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak

4. menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya
5. mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual

Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dituntut untuk benar-benar dapat mengolah rumah tangganya sendiri, sehingga segala sesuatunya tidak lagi bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat. Dalam hal Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengelola kegiatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten Garut dengan mengacu kepada UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten Garut.

Sebagai pelaksana dari peraturan daerah nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini

jika diperhatikan lebih disebabkan karena beberapa faktor seperti:

1. Sumberdaya manusia yang ada di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga Sosialisasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat kurang
2. Kesadaran masyarakat terhadap arti penting akta kelahiran masih kurang dan masyarakat terlihat kurang memiliki inisiatif untuk melaporkan kelahiran anaknya dalam waktu paling lama 60 hari
3. Faktor perilaku masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan tersendiri dalam usaha peningkatan pelayanan akta kelahiran di kabupaten Garut.

Selain permasalahan tersebut ada sebuah fenomena lainnya yang terjadi di Kabupaten Garut yaitu masalah kepemilikan akta kelahiran di masyarakat yang begitu rendah, dari jumlah penduduk pada tahun 2009 yang berjumlah 2.685.038 jiwa sedangkan masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran berjumlah 518.089 jiwa, jadi bisa diketahui bahwa masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran hanya sekitar 20% dari jumlah penduduk di Kabupaten Garut.

Fenomena tersebut di atas, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat kurang untuk melaporkan kelahiran anaknya dan masih kurang baiknya kemampuan sumberdaya di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyebabkan pelayanan pada masyarakat belum efektif sehingga kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di masyarakat Kabupaten Garut belum dilaksanakan secara optimal.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, Adapun pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini

adalah: Perilaku warga masyarakat menggunakan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Garut belum meningkat. Hal ini diduga antara lain karena belum optimalnya kinerja penyuluhan pencatatan sipil dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran. Maka pertanyaan masalahnya (*problem question*) yaitu: Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil terhadap Kinerja penyuluhan pencatatan sipil dalam meningkatkan Perilaku warga masyarakat menggunakan pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Garut?

B. KAJIAN LITERATUR

1. Tinjauan Tentang Kebijakan Penyelenggraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil

Bertambahnya dimensi pemerintahan dengan kegiatannya yang semakin kompleks, telah mendorong adanya perubahan-perubahan dalam berbagai Kebijakan Publik. Istilah Kebijakan yang di dasari oleh berbagai kepentingan yang mendasari perumusannya menciptakan pengertian Kebijakan yang bermacam-macam. Wahab (2008:7) menjelaskan tentang makna dari Kebijakan Publik sebagai berikut:

- (1) Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang serba acak dan kebetulan.
- (2) kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- (3) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- (4)

Kebijakan Publik mungkin bersifat positif, mungkin bersifat negatif.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Di dalam proses implementasi kebijakan publik ini pelaksana harus melakukan aktivitas/tindakan dan harus mengendalikan arah tindakan kebijakan sampai dicapai tujuan kebijakan. Wahab (2008:5) melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu:

a. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan. Garna (1996:117) mengatakan sosialisasi merupakan suatu proses sosial yang dijalani seseorang ... yang perlu dilalui seseorang individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakat ... Proses sosialisasi ... mempelajari dan menerima nilai-nilai, sikap, kemahiran dan peranan yang dapat membentuk kepribadiannya serta menyatukan diri ke dalam kelompok atau masyarakatnya. Sosialisasi kebijakan, dengan indikator: sasaran/tujuan, materi sosialisasi, metoda, kualifikasi pengetahuan, dan sasaran.

b. Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan yaitu pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Pelaksanaan merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat, Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu,

Pelaksanaan kebijakan dengan indikator: perencanaan, persiapan, dan pengorganisasian.

c. Penilaian/pengawasan kebijakan

Penilaian/pengawasan kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Penilaian kebijakan mencakup tentang: isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Pengawasan/penilaian kebijakan, dengan indikator: monitoring, supervisi, dan evaluasi

2. Tinjauan Tentang Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil

Orientasi atau kecenderungan sikap birokrasi di arahkan pada pencapaian tujuan, yaitu menjamin kepuasan pihak yang dilayani dan menjalankan suatu peraturan atau regulasi guna memelihara ketertiban masyarakat. Dengan demikian kinerja birokrasi merupakan gambaran dari kinerja para pegawainya.

Lembaga Administrasi negara (dalam Supriatna, 2001 : 132) menyatakan bahwa kinerja adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja/ hasil, kerja/ penampilan kerja yang diterjemahkan dari *performance*.

Dari beberapa definisi diatas dapat dinyatakan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja yang tentu saja tidak terlepas dari aspek manajerial yang mempengaruhinya dan berpedoman pada suatu standar kerja. Siagian (1998 : 27 – 29) menyatakan bahwa manajemen yang berhasil mengelola organisasi adalah mampu menjadikan organisasi berkinerja tinggi.

Iskandar (2005:229) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang sangat khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Lebih lanjut Iskandar (2005:229) mengatakan bahwa proses tersebut mempunyai penetapan yang bersifat universal. Hal ini sangat penting karena mempunyai arti bahwa fungsi-fungsi manajemen dapat dibedakan antara fungsi organik dan fungsi yang bersifat pelengkap.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang menitikberatkan pada usaha memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan yang diharapkan maka orang-orang di dalam organisasi harus jelas wewenang, tanggungjawab, dan tugas pekerjaannya.

Gulick pada tahun 1930 membuat akronim POSDCoRB untuk menjelaskan manajemen, dan dalam konteks Kinerja ini, Hasibuan (2006:26) menjelaskan tentang akronim POSDCORB sebagai fungsi manajemen yang terdiri dari:

- (1) *Planning (P)*: mengembangkan suatu garis besar apa yang harus dilakukan dan metoda untuk mencapai tujuan.
- (2) *Organizing (O)*: men-set struktur formal dari otoritas dalam suatu organisasi
- (3) *Staffing (S)*: semua hal yang berkenaan dengan seleksi dan perekrutan personel/pegawai
- (4) *Directing (D)*: membuat atau mengambil keputusan

- (5) *Coordinating (Co)*: hubungan antar komponen kerja yang bervariasi untuk melihat bahwa tujuan tercapai.
- (6) *Reporting (R)*: aktivitas untuk menjaga supervisor dan bawahannya memperoleh informasi tentang aktivitas seseorang.
- (7) *Budgeting (B)*: berhubungan dengan perencanaan keuangan, akuntansi, dan mengontrol tugas manajemen.

3. Perilaku Warga Masyarakat Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil

Perilaku Warga Masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan/menunjang pelayanan Pencatatan Sipil. Asumsi yang mendasari pelayanan pencatatan sipil adalah partisipasi bahwa masyarakat yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah masyarakat itu sendiri. Karena keputusan manajemen yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka mereka berhak menentukan isi keputusan itu. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat/ warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Kegiatan macam apakah yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi Hal ini menyangkut konseptualisasi tentang partisipasi. Konseptualisasi merupakan upaya menyusun “rambu-rambu” sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu fakta termasuk atau tidak termasuk ke dalam konsep itu. Jadi, penentuan rambu-rambu setidak-tidaknya bersifat mana suka sepanjang didasari dengan penalaran tertentu. Menurut Notoatmodjo, (2007: 126) ada beberapa hal yang bisa dilihat

dalam perilaku masyarakat didalam menggunakan pelayanan yaitu:

1. Mengikuti Penyuluhan

Dimensi ini dimaksudkan bahwa partisipasi berupa kegiatan atau perilaku luar individu masyarakat/ warga negara biasa yang dapat diamati misalnya dalam keikutsertaan mengikuti penyuluhan tentang pelayanan pencatatan sipil. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Penyuluhan pencatatan sipil adalah upaya menerapkan tertib administrasi di masyarakat melalui pendidikan luar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan serta kemampuannya dalam memanfaatkan pengetahuan tersebut. Prinsip yang dianut dalam penyuluhan pencatatan sipil adalah 1) selaras dengan program-program tertib administrasi, 2) sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan 3) dilaksanakan sebagaimana proses belajar mengajar dengan melalui pendekatan kegunaan. Didalam dimensi mengikuti penyuluhan terdapat indikator: jumlah, kebutuhan dan identifikasi.

2. Menyebar luaskan informasi

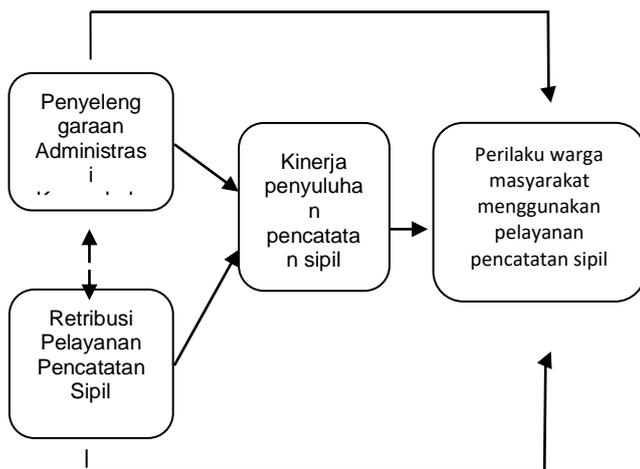
Problema yang sangat penting dalam menyebarkan informasi di masyarakat adalah komunikasi sebab organisasi tidak peduli bagaimana bentuk dan apa tujuannya serta fungsinya. Untuk itu kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan. Termasuk ke dalam pengertian ini seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan yang dibuat pemerintah. Didalam dimensi menyebarluaskan informasi terdapat indikator: program penyuluhan dan materi penyuluhan.

3. Menggunakan fasilitas

Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah

termasuk dalam konsep partisipasi. kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tak berupa kekerasan (*nonviolence*). Didalam dimensi menggunakan fasilitas terdapat indikator \therefore Fasilitas pelayanan dan kebutuhan.

Dengan demikian atas dasar kerangka pemikiran tersebut, penulis menggambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar.1 Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

• **HIPOTESIS UTAMA**

H₀ = Tidak terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil terhadap Kinerja penyuluhan pencatatan sipil dalam mewujudkan perilaku

warga masyarakat menggunakan pelayanan pencatatan sipil di kabupaten Garut.

H₁ = Terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil terhadap Kinerja penyuluhan pencatatan sipil dalam mewujudkan perilaku warga masyarakat menggunakan pelayanan pencatatan sipil di kabupaten Garut.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif dilakukan dengan teknik survey karena didalamnya terdapat gejala atau fenomena yang diamati adalah masalah Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil terhadap pelayanan pada masyarakat, dan perilaku masyarakat dalam menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil. Menurut Nazir (1999:65) metode survey adalah penyelidikan atau penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan fenomena yang dikaji secara sistematis untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti.

Dalam kegiatan pengumpulan data, alat ukur yang digunakan sesuai kebutuhan analisis penelitian adalah kuesioner atau angket. Pertanyaan yang diajukan dilakukan secara tertulis dan bersifat tertutup dimana jawabannya sudah disediakan, sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan, dengan memberikan tanda sesuai dengan petunjuknya dan kategori jawabannya terdiri dari lima tingkatan dengan menggunakan skala perbedaan semantik dengan tingkat pengukuran ordinal.

Untuk menguji validitas alat ukur penelitian, dengan menggunakan rumus

korelasi *Product Moment* dari Pearson. Sedangkan Teknik yang digunakan dalam mengukur reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini adalah Alfa Cronbach.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran (*target population*) adalah seluruh Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebanyak 74 orang.

Mengingat jumlah populasi terbatas, maka penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel atau seluruh populasi dijadikan responden penelitian (*sensus*).

Peneliti melakukan klasifikasi jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis data, berupa data primer dan sekunder, yaitu :
 - a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.
 - b. Data sekunder berupa dokumentasi-dokumentasi.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah :
 - a. Responden penelitian, yaitu Penyuluh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebanyak 74 orang.
 - b. Sumber data lainnya berupa dokumen-dokumen yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - a. Studi lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Observasi
 - 2) Wawancara
 - 3) Angket
 - b. Studi dokumentasi (*Library Research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku sumber, catatan, dokumen, brosur, hasil penelitian sejenis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah

penelitian. Pada penelitian ini, studi dokumentasi yang dimaksud adalah dengan mempelajari kebijakan penyuluhan agama Islam, kinerja penyuluh agama Islam, peningkatan pengamalan keagamaan, dan kerukunan hidup beragama di Kabupaten Garut.

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan dan analisis data dengan cara sebagai berikut :

1. Editing
2. Koding
3. Tabulating

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, dengan waktu pelaksanaan dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian

- a. Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - Rata-rata jawaban Responden terhadap 26 pertanyaan adalah Baik, sebesar 76,53%.
 - Persentase tertinggi: *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk tertib administrasi dengan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kab. Garut, sebesar 84,59%*.
 - Persentase terendah: *Perubahan sasaran termasuk perubahan materi sosialisasi dan Kabupaten Garut telah melaksanakan dan menetapkan standar pengawasan yang tepat, sebesar 70,54 %*.
 - Temuan permasalahan antara lain: *Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menjadi landasan Program Kepemilikan Akta Kelahiran belum disosialisasikan secara baik kepada*

seluruh masyarakat dan standar pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan belum jelas.

b. Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil

- Rata-rata jawaban Responden terhadap 25 pertanyaan adalah Baik, sebesar 76,69%.
- Persentasi tertinggi: *Reteribusi Pelayanan Pencatatan Sipil bertujuan untuk tertib administrasi dengan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kab. Garut* 80,81%.
- Persentase terendah: *Untuk kualifikasi petugas sosialisasi tentang Reteribusi Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan pemilihan/recruitment khusus sebesar* 68,11 %.
- Temuan permasalahan antara lain: *minimnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas dan masih rendahnya tingkat pendidikan diduga kuat sebagai sulitnya mencari orang yang berkualitas dan profesional di bidangnya, hasilnya materi sosialisasi yang akan disampaikan menjadi tidak maksimal*

c. Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil

- Rata-rata jawaban Responden terhadap 28 pertanyaan adalah Baik, sebesar 72,96%.
- Persentase tertinggi: *Dalam membuat rencana kerja selalu menetapkan tujuan yang akan dicapai,* sebesar 84,59%.
- Persentase terendah: *Hasil Kerja pegawai dibahas dan dievaluasi pada pertemuan/staf meeting* 62,70%.
- Temuan permasalahan antara lain: *dalam peningkatan kinerja pegawai, pimpinan tidak melakukan pembinaan, kurangnya sinkronisasi pimpinan dan*

bawahan, sehingga tidak mencapai hasil kerja yang lebih baik.

d. Perilaku Warga Masyarakat Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil

- Rata-rata jawaban Responden terhadap 20 pertanyaan adalah Cukup Baik, sebesar 64,19%.
- Persentase tertinggi: *Sejauh mana Kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat menjadi prioritas utama,* sebesar 74,59 %.
- Persentase terendah: *Warga masyarakat yang menyampaikan informasi tentang pelayanan pencatatan sipil dengan menggunakan alat peraga atau poster penyuluhan ,* sebesar 54,32 %.
- Temuan permasalahan antara lain: *Warga masyarakat yang menyampaikan informasi tentang pelayanan pencatatan sipil tidak dengan menggunakan alat peraga atau poster penyuluhan.*

2. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Utama dan Pembahasan

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : *“Terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X) terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) dalam mewujudkan Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z)”*. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,6140.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y dan Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 72}$) yaitu $t_{hitung} = 6,6004 > t_{tabel} = 1,9935$. Dari nilai tersebut

diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) dan Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar = 0,3770. Nilai ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X) berpengaruh terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) dan Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) sebesar 37,70 %, sedangkan sisanya ($P_{YZ\epsilon}$)² sebesar 62,30 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model.

b. Pengujian Sub Hipotesis dan Pembahasan

1. Pengaruh Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y)

Secara simultan, variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) memberikan pengaruh secara signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa F_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari F_{tabel} ($F_{0,05;2; 71}$) yaitu $F_{hitung} = 13,7347$ dan $F_{tabel} = 3,13$. Hal ini berarti bahwa variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* ($R^2_{YX_1, X_2}$) sebesar = 0,2790. Nilai ini menunjukkan bahwa Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) dipengaruhi oleh Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) sebesar 27,90 %, sedangkan sisanya ($P_{Y\epsilon}$)² sebesar 72,10 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Secara parsial, hipotesis penelitiannya adalah : (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memberikan pengaruh terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil; dan (2) Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil memberikan pengaruh terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil. Sebagai pembuktian terhadap hipotesis tersebut, maka dilakukan pengujian secara individu melalui *Uji-t student*. Variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari pada $t_{0,975}$, yang berarti H_0 diterima. Artinya bahwa secara parsial, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) tidak memberikan pengaruh secara nyata terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y). Demikian pula variabel Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari pada t_{tabel} .

2. Pengaruh Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z)

Secara simultan, variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) terhadap Perilaku Warga Masyarakat

menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) memberikan pengaruh yang signifikan. Ini diperlihatkan dari hasil pengujian variabel X_1 dan X_2 terhadap Z menunjukkan pengaruh yang signifikan, karena F_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari F_{tabel} ($F_{0,05;2; 72}$) yaitu $F_{hitung} = 18,29$ dan $F_{tabel} = 3,13$. Hal ini berarti bahwa variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh Koefisien determinasi $R^2_{Z(X_1, X_2)}$ sebesar $= 0,3401$. Nilai ini menunjukkan bahwa Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) dipengaruhi oleh Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) sebesar 34,01 %, sedangkan sisanya ($P_{Z\epsilon}$)² sebesar 65,99 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil.

Secara parsial, hipotesis penelitiannya adalah : (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memberikan pengaruh terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil; dan (2) Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil memberikan pengaruh terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil. Sebagai pembuktian terhadap hipotesis tersebut, maka dilakukan pengujian secara individu melalui *Uji-t student*. Variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari pada $t_{0,975}$, yang berarti H_0 diterima. Artinya bahwa secara parsial, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) tidak memberikan pengaruh secara nyata terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan

Pelayanan Pencatatan Sipil (Z). Sedangkan variabel Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) berpengaruh secara nyata terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari pada t_{tabel} .

3. Pengaruh Variabel Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : *“terdapat pengaruh antara Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil”*. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,5943.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Y terhadap Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 72}$) yaitu $t_{hitung} = 6,2709 > t_{tabel} = 1,9935$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) berpengaruh terhadap variabel Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{ZY}) sebesar $= 0,3532$. Nilai ini menunjukkan bahwa Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) berpengaruh terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) sebesar 35,32%, sedangkan sisanya ($P_{Y\epsilon}$)² sebesar 64,68% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil yang tidak dimasukkan ke dalam model.

4. Pengujian Antara Variabel Bebas (Korelasi X_1 dan X_2)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “*Terdapat hubungan korelasi antara Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil*”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian korelasi product moment dari Pearson. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,8519 dengan sifat hubungan berkorelasi positif.

Untuk mengetahui lebih lanjut keterkaitan antara variabel X_1 dan X_2 , maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hit} = 13,8021 > t_{0,975} = 1,9935$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga kedua variabel tersebut, yaitu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X_1) dengan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X_2) memiliki keeratan hubungan yang sangat signifikan.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil berpengaruh secara nyata dan positif terhadap Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil dan Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Temuan Permasalahan Penelitian antara lain:
Pertama, pada variabel Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan pada sasaran, monitoring dan evaluasi.

Kedua, dalam variabel Retribusi pelayanan Pencatatan Sipil pada metoda dan kualifikasi pengetahuan.

Ketiga, pada variabel Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil pada menentukan standar dan hasil kerja.

Keempat, dalam variabel Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil pada pertukaran informasi dan materi penyuluhan.

Implikasi dari temuan fenomena dalam penelitian ini adalah terhambatnya upaya penyampaian informasi program kepemilikan akta kelahiran kepada masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap masih rendahnya tertib administrasi kependudukan di masyarakat.

1. Saran-saran

- a. Untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan; Dalam pelaksanaan kebijakan ternyata masih banyak kekurangan baik dari mulai disosialisasikan sampai dengan pengendalian serta pengawasannya. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas Pelayanan Pencatatan sipil di Kabupaten Garut maka perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap seluruh komponen, baik terhadap aparatur pemerintah maupun kepada masyarakat/keluarga, agar hasil sosialisasi yang disampaikan dapat di pahami dan dimengerti serta memberikan manfaat yang lebih baik, selanjutnya meningkatkan pengawasan dengan melibatkan semua pihak yang

peduli serta memperbaiki tingkat mentalitas pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan akan tercapai.

- b. Untuk pemecahan masalah teknis;
- Pertama*, Supaya tujuan kebijakan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, penulis menyarankan hendaknya sosialisasi dan pengawasan yang dilaksanakan harus secara baik dan fungsi kebijakan dilaksanakan secara lebih efektif melalui koordinasi yang didukung dengan komunikasi yang persuasif maka pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan
- Kedua*, Supaya tujuan program kepemilikan akta kelahiran dapat mencapai keberhasilan maka dalam pelaksanaan sosialisasi Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil harus dengan metoda yang baik serta dilaksanakan oleh para penyuluh yang memiliki kualifikasi pengetahuan yang baik pula
- Ketiga*, Pelaksanaan Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil dalam melakukan Pelayanan yang baik akan menunjang terhadap mutu pelayanan pencatatan sipil kepada warga masyarakat.
- Keempat*, Perilaku Warga Masyarakat Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil sangat menunjang terhadap keberhasilan tertib administrasi termasuk dalam program kepemilikan akta kelahiran.

F. REFERENSI

Ahmadi, Abu, 2007, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta

- Ajzen I, 1991, *Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision*, Berlin
- Arikunto, Suhermini, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Azwar, Saifudin. 2002, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*). Pustaka Pelajar Jogjakarta
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dunn, William, N. 1999, *Analisis Kebijakan Publik, Penyadur Muhajirin Darwin*, Hanindita Graha Widya, Jakarta
- Echols John M. & Hassan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gibson, James L., Invancevich, John M., dan Donnelly, Jame H. Jr. (1996), *Organisasi*, alih bahasa Ir. Nunuk Ardiani, MM, Bina Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu SP, 2006, *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Irawan, Hardi, 2002, *Strategi Efektif Merebut Pasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Irawan, Suhartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- _____, 2005, *Metodologi Penelitian dan Administrasi*. Puspaga. Bandung
- _____, 2009, *Teori Sosial*, Puspaga, Bandung
- _____, 2009, *Teori dan Isu Pembangunan*, Puspaga, Bandung
- Islamy, Irfan, 2000. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Jones, Charles, O. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, diterjemahkan oleh Nasir

- Budiman, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maryoto, Pasaribu, 2000, *Kinerja Layanan Perusahaan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Muhadjir, Darwin, 2005, *Kebijakan Publik Negara Berkembang*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Notoatmodjo, soekidjo, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-prinsip Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2007, *Sosiologi untuk Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Poerwadarmita, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Pudyatmoko, Y Sri, 2009, *Perizinan problem dan Pembenahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, 2009
- Rasyid, M. ryaas, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Offset, Yogyakarta
- Setianto, Anton Yudi, 2008, *Mengurus perijinan dan dokumen*, Forum sahabat, Jakarta
- Siagian, P. 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Singaribuan, Masri dan Efendi, Sofian, 2001, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Siswosoediro, Henry S., 2008, *Mengurus surat-surat Kependudukan (Identitas diri)*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- _____, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- _____, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Sudjana, Egi, 2002, *Uji Statistik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Supriatna Tjahya, 2000, *Legitimasi Pemerintahan: Manajemen dan Organisasi Publik serta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Maulana, Bandung
- Supriatna, Cahya, 2001, *Akuntabilitas Pemerintah dalam Administrasi Publik*, Indra Prahasta, Bandung
- Susilo, Maryoto, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Thoha, Miftah, 1999, *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahab, Abdullah Salihin, 1997, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2008, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Yashin, Suichan, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI Besar)*, Amanah, Surabaya

DOKUMEN-DOKUMEN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Surat MDN Nomor 477/2280/MD Tanggal 31 Mei 2007 Perihal Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Surat Edaran Mendagri No, 474.1/2218/SJ
tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Rencana
Strategis Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009
tentang penyelenggaraan Pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di
kabupaten Garut

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang
retribusi pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil di kabupaten Garut.

Peraturan Bupati Garut Nomor 406 tahun
2008, tentang tugas pokok, fungsi dan
tata kerja dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten Garut

RAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Garut

Laporan Tahunan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2009